

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA



**LAPORAN
KINERJA
(LKj)**

2023

**KANTOR
KECAMATAN
SOMBA OPU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Somba Opu Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Somba Opu Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2021-2026. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021-2026).

LKj Kantor Kecamatan Somba Opu disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Somba Opu. Penyusunan LKj Kantor Kecamatan Somba Opu Tahun 2023 bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kecamatan Somba Opu untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Kecamatan Somba Opu Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Indikator kinerja utama yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Kecamatan Somba Opu Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bonto-Bontoa, Februari 2024

Camat Somba Opu



AGUSSALIM, S.Sos, M.Si

NIP. 19720802 199402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kantor Kecamatan Somba Opu melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kantor Kecamatan Somba Opu untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kantor Kecamatan Somba Opu untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Kantor Kecamatan Somba Opu tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Somba Opu. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Somba Opu ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Somba Opu di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI	<u>iii</u>
DAFTAR TABEL & GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu Strategis	4
Strategi Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Tujuan dan Sasaran	7
B. Strategi dan arah Kebijakan	9
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
D. Perjanjian Kinerja	11
E. Standar Penilaian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
PENGUKURAN RENCANA AKSI TAHUN 2023	
RENCANA AKSI TAHUN 2024	
RENCANA STRATEGIS 2021-2026	
POHON KINERJA/CASCADING	
SOP PENYUSUNAN LKj TAHUN 2023	

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Somba Opu	3
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Somba Opu berdasarkan Pangkat/Gol	4
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kec. Somba Opu	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kec. Somba Opu	11
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Sasaran Strategis	12
Tabel 2.5	Standar Penilaian Kinerja	13
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	15
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2021-2026	17
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal atau Standar Nasional lainnya	17
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	19
Tabel 3.6	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Kec. Somba Opu Tahun 2023	26

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah Kecamatan Somba Opu.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam

BAB I



PENDAHULUAN

Rencana Strategis, Kecamatan Somba Opu berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Somba Opu.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Somba Opu.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Somba Opu, Disebutkan bahwa Kecamatan Somba Opu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan Somba Opu dipimpin oleh Camat yang

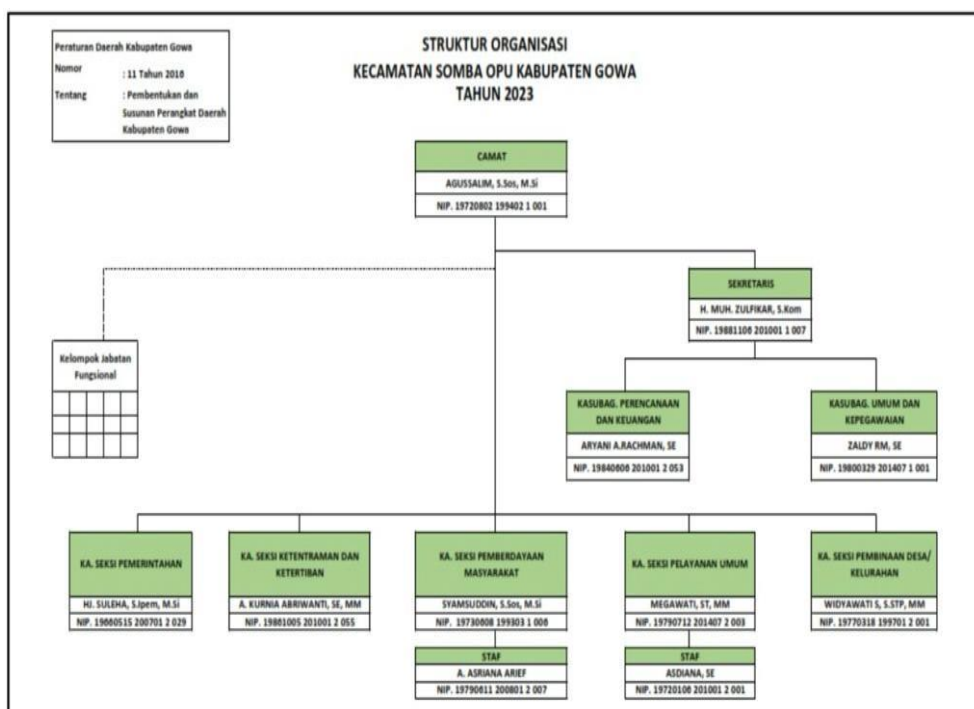
KECAMATAN SOMBA OPU

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Camat Somba Opu dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Somba Opu
Tahun 2023



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kec. Somba Opu berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pengatur	II/c	1 orang
2	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang
3	Penata Muda	III/a	-
4	Penata Muda Tk. I	III/b	12 orang
5	Penata	III/c	36 orang
6	Penata Tk. I	III/d	20 orang
7	Pembina	IV/a	4 orang
8	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang
Jumlah			75 orang

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Somba Opu tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu Strategis yang dihadapi Kantor Kecamatan Somba Opu berkaitan dengan tugas umum pemerintahan, dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Somba Opu dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan dan Kelurahan tingkat Kecamatan Somba Opu ;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang baik di tingkat

Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan;

3. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Somba Opu dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Somba Opu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan;
2. Belum optimalnya realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan;
3. Tingkat koordinasi kewilayahan masih rendah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Somba Opu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi di bidang tugasnya masing-masing;
2. Belum optimalnya pelaporan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (SIMDA) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Somba Opu selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Somba Opu Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Kecamatan Somba Opu berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

KECAMATAN SOMBA OPU

Usaha yang dilakukan Kecamatan Somba Opu dalam meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada aspek internal, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja pelayanan serta melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kerja bagi masyarakat. Selain itu, data dan informasi diperlukan berkaitan dengan pencapaian rencana program dan kegiatan secara berkala khususnya dalam mendukung sasaran strategis Kecamatan Somba Opu. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Kecamatan Somba Opu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Somba Opu. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kecamatan Somba Opu Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Somba Opu Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke-4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

Misi ke-4 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien.

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KECAMATAN SOMBA OPU

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Somba Opu sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Somba Opu di antaranya adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pos pelayanan publik
2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pos pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00 (Baik)	86,00 (Baik)	87,00 (Baik)	88,00 (Baik)	89,00 (Sangat Baik)
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A

Pada tahun 2023, telah dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Somba Opu yaitu berupa pengurangan 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis. Hal tersebut dilakukan karena setelah rewiu dan penyesuaian terhadap pohon kinerja, maka tujuan “Meningkatkan perkembangan status desa dan kelurahan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan” dengan indikator “Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang” dihilangkan, karena tujuan dan sasaran tersebut bukan merupakan kinerja inti dari Kecamatan Somba Opu melainkan hanya melekat di kecamatan tetapi pengelolaannya oleh 14 Kelurahan di Kecamatan Somba Opu.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Kecamatan Somba Opu sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Sedangkan arah kebijakan Kecamatan Somba Opu untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Standar Operasional Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi Kecamatan Somba Opu adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Kecamatan Somba Opu pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somba Opu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Somba Opu Nomor : 05/Kep-KSO/VIII/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Adapun indikator kinerja utama Kecamatan Somba Opu Tahun 2023 yaitu:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kec. Somba Opu

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00 (Baik)	86,00 (Baik)	87,00 (Baik)	88,00 (Baik)	89,00 (Sangat Baik)
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 mengalami perubahan, yaitu pengurangan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan indikator Persentase peningkatan kelurahan kategori cepat berkembang. Hal tersebut dilakukan karena setelah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis kecamatan dan penyesuaian terhadap Pohon Kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, IKU Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bukan merupakan kinerja inti kecamatan, karena program yang mendukung IKU tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Somba Opu

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00 (Baik)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 16.500.000,-

Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	75,00 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.765.268.354,-

Sasaran strategis 1 yakni Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan total anggaran sebesar Rp 16.500.000,-.

Sedangkan sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan total anggaran sebesar Rp 7.765.268.354,-. Program ini memiliki anggaran yang cukup besar karena termasuk didalamnya Anggaran Gaji dan Tunjangan 75 orang ASN di Kecamatan Somba Opu sebesar Rp 6.838.931.400,-. Berikut rincian anggaran untuk masing-masing sasaran pada Kecamatan Somba Opu.

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rp 16.500.000,-
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Rp 7.765.268.354,-

Perjanjian Kinerja pada Kecamatan Somba Opu pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Camat Somba Opu pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Juli 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- 1) Perubahan arah kebijakan sebagai dampak untuk merespon perubahan lingkungan strategis
- 2) Pengurangan 1 (satu) indikator kinerja utama. Sasaran strategis atau indikator kinerja sebelumnya adalah Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Sasaran tersebut dihilangkan karena Program dan anggaran sepenuhnya dilaksanakan pada kelurahan.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Somba Opu ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00 (Baik)	86,283	100,33%	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	75, 00 (BB)	N/A	N/A	Belum ada nilai dari Inspektorat

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator kinerja belum bisa diketahui persentase rata-rata keberhasilannya pada tahun 2023 karena untuk nilai dari indikator yang kedua belum diperoleh.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,80	85,009	86,283				100,01%	100,33%			
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	B	BB	N/A				BB (100%)	N/A			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 menunjukkan peningkatan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a) **Sasaran strategis** : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai IKM di Kecamatan Somba Opu diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara manual setiap akhir tahun menunjukkan tingkat Kepuasan masyarakat dengan hasil 85,283 (Baik), yang artinya mencapai target yang di perjanjikan.

- b) **Sasaran strategis** : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator kinerja : Nilai SAKIP, nilai belum diperoleh karena belum ada LHE SAKIP Kecamatan Somba Opu tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Rencana Strategis 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00 (sangat baik)	85,009	86,283				
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	A	BB	N/A				

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Untuk Kecamatan Somba Opu tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kecamatan memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bukan Urusan pemerintahan Wajib sehingga Analisa untuk mengukur capaian kinerja sasaran yang membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran instansi dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional tidak dilakukan.

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/
Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2023	Target	Realisasi
				2023	2023
1	2	2	4	5	6
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,283 (baik)	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	N/A	-	-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik (rata-rata capaian indikator sekitar 100,33%) sesuai yang diperjanjikan.

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86,283 (**Berhasil**) telah tercapai 100,33% sesuai dengan target yaitu 86,00.

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik di Kecamatan Somba Opu disebabkan faktor pendukung sebagai berikut:

- Kecamatan Somba Opu memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada pelayanan di Kecamatan Somba Opu
- Sarana pengaduan yang memadai berupa kotak saran, pos pengaduan dan SP4N Laporan.
- Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Indikator 1 : Nilai SAKIP (**Belum ada nilai**), dikarenakan belum ada nilai LHE SAKIP Kecamatan Somba Opu dari Inspektorat Kab. Gowa. Namun diharapkan nilai SAKIP untuk Kecamatan Somba Opu tahun 2023 sesuai dengan yang ditargetkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Somba Opu dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Somba Opu adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Somba Opu dalam pelaksanaan program kegiatan.

**Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	86,283	100,33%	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	100%	0,33% (efektif)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	N/A	N/A	Rp 7.765.268.354	Rp 7.008.817.574	90,26%	N/A

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,33% dan capaian anggaran 100%, menunjukkan bahwa efektifitas anggaran

sebesar 0,33% namun tdk ada efisiensi anggaran karena 100% anggaran terealisasi.

- 2) Indikator Nilai SAKIP untuk tahun 2023 belum ada nilai sehingga belum bisa diketahui efisiensi dan efektifitas terhadap penggunaan sumber daya (anggaran).

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,33%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	8 unit	8 unit	100%	
				Persentase layanan yang memiliki SOP	100%	100%	100%	
				Persentase layanan sesuai SP	100%	100%	100%	
				Persentase tindak lanjut pengaduan yang tersedia	100%	100%	100%	
				Persentase usulan masyarakat yang diakomodir	50%	23,45%	50,91%	
				Persentase hasil SKM yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	100%	100%	
				Jumlah kinerja pegawai yang sesuai target	31 kinerja program dan kegiatan	31 kinerja program dan kegiatan	100%	
				Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 laporan	1 laporan	100%	
				Jumlah laporan kinerja yang dipublikasi	1 laporan	1 laporan	100%	
				Persentase pegawai dengan kinerja baik	100%	100%	100%	

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 86,00 telah berhasil tercapai sebesar 86,283 atau tercapai 100,33%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Indikator dari Program ini terdiri atas:

- Jumlah sarana dan prasarana yang memadai, dengan target 8 unit, realisasi 8 unit sehingga capaian 100%. Adapun sarana dan prasarana ini terdiri dari: ruang pelayanan, loket pelayanan, ruang tunggu, aksesibilitas, fasilitas penyandang disabilitas, ruang laktasi, area parkir, dan prosedur pelayanan.
- Persentase layanan yang memiliki SOP, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Setiap layanan memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan pedoman dalam memberikan setiap pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase layanan sesuai SP, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- Persentase tindak lanjut pengaduan yang tersedia, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Setiap pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesegera mungkin, baik pengaduan langsung di pelayanan pengaduan maupun pengaduan melalui aplikasi SP4N Lapor, LINTAKA dan media lainnya.
- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir, dengan target 50%, realisasi 25,45% dan capaian 50,91%. Dari 110 program/kegiatan yang diusulkan, ditargetkan 50% usulan dapat terealisasi, namun yang terealisasi hanya 28 usulan atau sekitar 50,91% dari target. Untuk indikator ini belum tercapai sesuai target dikarenakan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disesuaikan kembali dengan kemampuan SKPD

terkait yang akan merealisasikan setiap usulan masyarakat yang masuk dengan memperhatikan skala prioritas kabupaten.

- Persentase hasil SKM yang ditindaklanjuti, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Rencana Tindak Lanjut hasil SKM pada prosedur pelayanan, kompetensi petugas layanan dan kualitas sarana dan prasarana telah direalisasikan.

Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator : Nilai SAKIP dengan target predikat BB, belum ada nilai hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Gowa. Adapun Program yang mendukung untuk mencapai target dari indikator ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota. Indikator dari Program ini terdiri atas:

- Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Setiap program dan kegiatan yang ada dalam perencanaan kinerja telah dilaksanakan
- Jumlah kinerja pegawai yang sesuai target, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Penilaian kinerja pegawai didasari atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dimana target kinerja pegawai disusun berdasarkan tujuan organisasi yang kemudian dilakukan pemantauan, pembinaan dan penilaian kinerja oleh atasan langsung pegawai.
- Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Kecamatan Somba Opu telah menyusun Laporan Kinerja sesuai
- Jumlah laporan kinerja yang dipublikasi, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Laporan Kinerja Kecamatan Somba opu yang telah direviu dan dievaluasi oleh SKPD terkait nantinya akan dipublikasikan melalui media publikasi berupa website Kecamatan Somba Opu maupun di aplikasi eSAKIP.
- Persentase pegawai dengan kinerja baik, dengan target 100%, realisasi dan capaian 100%. Hal ini dapat dilihat pada masing-

KECAMATAN SOMBA OPU

masing Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah dievaluasi dan dinilai oleh Camat Somba Opu. Dari data yang SKP yang diperoleh, 100% pegawai yang ada di Kecamatan Somba Opu telah berkinerja baik. Adapun salah satu sasaran kegiatan dari indikator program ini yaitu pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi. Dan di tahun 2023, telah dilakukan pemberian penghargaan kepada 4 orang pegawai yang dinilai berdasarkan kedisiplinan, loyalitas dan kinerja. Ini juga merupakan salah satu cara untuk memotivasi semua pegawai agar dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Somba Opu pada tahun 2023 melalui 2 (dua) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah :

- Peningkatan kompetensi staf melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan
- Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan, diantaranya dengan melakukan perbaikan dan pembenahan beberapa gedung yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan loket atau ruang tunggu dan ruang yang dapat mendukung kegiatan pelayanan.
- Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat dan aparatur kelurahan tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis)
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi (Disdukcapil dan Diskominfo) terkait dengan fasilitasi penunjang pelayanan/ jaringan internet;
- Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kembali terhadap prosedur pelayanan

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah :

- Meningkatkan Kualitas pelaporan kinerja agar Nilai SAKIP dapat mencapai target yang telah ditetapkan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan minimal per triwulan.
- Memberikan penghargaan kepada pegawai.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 90,22% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Kec. Somba Opu Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 16.500.000,-	Rp 16.500.000,-	100%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 16.500.000,-	Rp 16.500.000,-	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp 16.500.000,-	Rp 16.500.000,-	100%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.765.268.354	Rp 7.008.817.574	90,26%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.838.931.400	Rp 6.220.345.374	90,95%
	Sub Keg : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.838.931.400	Rp 6.220.345.374	90,95%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 10.400.000	Rp 10.400.000	100%
	Sub Keg : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 10.400.000	Rp 10.400.000	100%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34.121.100	Rp 24.600.000	72,10%
	Sub Keg : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 34.121.100	Rp 24.600.000	72,10%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 848.615.854	Rp 720.959.200	84,96%
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 848.615.854	Rp 720.959.200	84,96%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp 33.200.000	Rp 32.513.000	97,93%
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp 33.200.000	Rp 32.513.000	97,93%
Program yang tidak mendukung sasaran strategis				
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 6.345.102.775	Rp 5.719.763.195	90,14%
	Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 6.345.102.775	Rp 5.719.763.195	90,14%
	Sub Keg : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 459.361.675	Rp 457.332.770	99,58%
	Sub Keg : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 5.885.741.100	Rp 5.262.430.425	89,41%
	TOTAL	Rp 14.126.871.129	Rp 12.745.080.769	90,22%

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tetap dimasukkan ke Laporan Realisasi Anggaran agar tidak ada gap/perbedaan Laporan Realisasi Keuangan dengan Laporan di LKjIP meskipun Program ini tidak mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis Kecamatan Somba Opu karena anggaran program pemberdayaan masyarakat di kelurahan hanya melekat di Kecamatan dan dikelola oleh 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Dari hasil analisis capaian Kecamatan Somba Opu tahun 2023, maka dapat disimpulkan:

- Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM telah mencapai target, dengan nilai IKM 86,283 dari target 86,00, sehingga capaiannya sebesar 100,33%
- Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan indikator Nilai SAKIP, untuk tahun 2023 belum ada nilai hasil LHE SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Gowa. Namun besar harapan Kecamatan Somba Opu memperoleh nilai sesuai dengan target indikator sasaran.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

- Pada indikator Nilai IKM, terus dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Somba Opu, baik dari peningkatan sarana dan prasarana maupun kualitas Sumber Daya Manusia.
- Pada indikator Nilai SAKIP, akan terus dilakukan upaya peningkatan kualitas dokumen SAKIP.

Hasil evaluasi capaian kinerja dipergunakan Kantor Kecamatan Somba Opu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.

KECAMATAN SOMBA OPU